



BUPATI TANGGAMUS

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang jelas terukur maka diperlukan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan dan kesepakatan kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh pejabat instansi sebagai penerima amanah dan sebagai tolak ukur keberhasilan instansi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja atas laporan kinerja instansi pemerintah disebutkan Pemerintah Kabupaten menyusun perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh Bupati yang tujuannya menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pejabat Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah menyusun Perjanjian Kinerja masing- masing Satuan Kerja sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja instansi masing - masing

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja KabupatenTanggamus adalah tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang merupakan tindak lanjut / langkah masa depan yang tepat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam [Sistem Kinerja Intansi Pemerintah](#). Pemerintah Kabupaten Tanggamus dari perencanaan pembangunan yang merupakan tindak lanjut/ langkah masa depan yang tepat.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. dikarenakan terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran serta adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam proses Perjanjian Kinerja tidak terlepas dari pelaksana prinsip otonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan thun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (autcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup autcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kinerja 2017

Maksud Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja 2017

Tujuan Umum :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Maka tersusunlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 seperti yang terlampir pada lampiran dokumen ini. Perjanjian Kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 diharapkan dapat dijadikan tindak lanjutan dari perencanaan pembangunan dan tak lepas dari pelaksanaan prinsip otonomi agar meningkatkan prinsip meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Besar harapan kami Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	H.BAMBANG KURNIAWAN
JABATAN	BUPATI TANGGAMUS

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kota Agung, 5 Januari 2016
BUPATI TANGGAMUS,

H.BAMBANG KURNIAWAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Laju pertumbuhan ekonomi	5,80%
	2. Menurunnya tingkat pengangguran (angka pengangguran)	1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,62%
		2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,50%
	3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan (barang dan jasa terhadap PDRB)	1 Rata-rata pertumbuhan sektor perdagangan per tahun	1,50%
		2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,05%
	4. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	1 Jumlah koperasi sehat	204
		2 Persentase penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi	12%
	5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6.50%
6. Meningkatnya kontribusi investasi (penanaman modal terhadap keuangan daerah	1 Persentase nilai relaisasi PMDN	6,00%	
7. Meningkatnya kapasitas perekonomian masyarakat pedesaan	1 Jumlah pekon yang memiliki badan usaha	400	
8. Menurunnya persentase angka kemiskinan	1 Angka kemiskinan	14%	
2	9. Meningkatnya indeks pengetahuan masyarakat (indeks pendidikan)	1 Angka Melek Huruf	96,50%
		2 Angka Rata-Rata Lama Sekola	7,35 Tahun
	10.. Meningkatnya minat baca	1 Jumlah pengunjung	5.631 orang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target 2016
1	2	3	4
		2 Persentase minat baca masyarakat	10%
	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	67,58 Thn
		2 Angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	6,50/1.000 kh
		3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	123,1/100.000 kh
	12. Terwujudnya pengendalian Hidup	1 Angka Laju pertumbuhan penduduk	1,13%
3	13. Terwujudnya pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) sebagai kawasan strategi nasional	Luas wilayah industri	487,5 Ha
	14. Meningkatnya infrastruktur prasarana dan sarana transportasi	1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam kondisi Baik	78,60%
		2 Persentase Terminal dalam Kondisi Baik	75%
		3 Persentase dermaga dalam kondisi baik	73%
	15. Meningkatnya penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi	1 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	75%
		2 Persentase kawasan industri dan perekonomian yang dialiri PDAM	68%
	16. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif.	1 Rasio rumah layak huni	70%
		2 Persentase kawasan kumuh	25%
	17. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1 Angka Ratio Elektrifikasi	70%
	18. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya mineral terhadap perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah	6,85%
	19. Meningkatnya daya dukung	1 Persentase wilayah jangkauan	60%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	layanan akses telekomunikasi dan internet	
4	20. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tanggamus	1 Nilai Tukar Petani	138.50
		2 Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB	8,91%
		3 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	12,06%
		4 Kontribusi Sektor Perkebunan Tahunan terhadap PDRB	12.89%
		5 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	2,45%
		6 Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,28%
	21. Tersedianya pangan yang cukup baik	1. Jumlah desa mandiri pangan	30 pekon
		2. Jumlah cadangan pangan Kabupaten	30 ton
5	22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	1 Persentase terjaganya Kualitas mutu Lingkungan	70%
		2 Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	34%
		3 Penilaian Kota Sehat	Adipura
	23. Berkurangnya wilayah rawan bencana dan menekan angka resiko bencana	1 Wilayah Kebanjiran	4 Kecamatan
		2 Wilayah Kekeringan	4 Kecamatan
		3 Ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran setelah pengaduan	15 Menit
		4. Desa sigap bencana alam	5 pekon
6	24. Meningkatnya keunggulan komparatif inovasi daerah terhadap produk daerah	1 Jumlah peningkatan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 komoditas
	25. Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata daerah	1 Jumlah kunjungan wisata	109.300
		2. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,09%
	26. Meningkatnya prestasi olahraga	1 Peringkat pada pekon olahraga provinsi	10 besar
7	27.. Meningkatnya Pembangunan Berkesetaraan gender dan perlindungan anak	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	64.60
		2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56.00
		3 Persentase partisipasi	20%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target 2016
1	2	3	4
		perempuan di parlemen	
		4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	38,50%
		5. Rasio KDRT	3
	28..Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah dan keuangan daerah	1 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanggamus	B
		2 Nilai evaluasi kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Sedang
		3 Opini Laporan Keuangan oleh auditor eksternal	WTP
	29.Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1 Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	1,85%
	30 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Indeks kepuasan Masyarakat	75
	31 Meningkatkan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan	1 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	-
	32 Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan nyaman	1 Jumlah Konflik sosial	0
		2 Angka kriminalitas	60